



BIMTEK—Ketua DPRD Sumbar, Supardi beri pencerahan saat Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebudayaan Kota Payakumbuh, Sabtu (8/6) di salah satu hotel di Bukittinggi. (ist)

Saatnya Payakumbuh Jadi Kota Tujuan

BUKITINGGI - SINGGALANG

Payakumbuh yang selama ini merupakan kota transit harus bisa diubah menjadi kota tujuan. Jika tidak, maka cepat atau lambat, kota ini akan menjadi daerah tertinggal.

Untuk menjadi kota tujuan, Payakumbuh memiliki potensi teramat besar, yakni adat bu daya. Terbesar salah satunya adalah peradaban Maek dan banyak kekayaan budaya lain nya.

"Siapa bilang Payakumbuh tidak bisa berubah jadi kota tujuan, setanding dengan Bali dan Yogyakarta? Kita bisa jika kita mau, Payakumbuh punya potensi besar," ujar Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat membuka acara Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebudayaan Kota Payakumbuh, Sabtu (8/6) malam di salah satu hotel di Bukittinggi.

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Payakumbuh selama ini ditopang oleh sektor UMKM dan kuliner. Ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi stagnan, bahkan cenderung menurun.

"Berdasarkan data BPS, Payakumbuh juga memiliki masalah kemiskinan yang meng

khawatirkan," ujarnya.

Tingkat kemiskinan Payakumbuh berada pada posisi kedelapan dari total 19 kabupaten/kota di Sumbar. Sementara dari total tujuh kota di Sumbar, Payakumbuh berada pada posisi keenam.

Ia menilai, jika nanti pembangunan tol yang menghubungkan Sumbar Riau selesai maka pertumbuhan ekonomi Payakumbuh akan semakin terancam karena daerah peringgahan akan mengalami kekurangan kunjungan.

"Namun di lain sisi, tol itu harus dibangun, kalau tidak Sumbar akan menjadi semakin tertinggal pula dibanding provinsi lain," tegasnya.

Oleh karena itulah, ia menilai Payakumbuh harus berubah dari daerah transit menjadi daerah tujuan.

"Ini berhasil dilakukan Banyuwangi. Dulu mereka kesulitan perekonomian, dianggap daerah santet dan sebagainya. Orang malas berkunjung, tapi sekarang ekonomi pesat, dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri. Mereka membuat festival hampir tiap bulan menyemarakkannya dengan permainan khas adat. Payakumbuh juga bisa seperti itu," tegasnya.

Ia mengatakan, jika peradaban Maek terbukti ada sejak 4000 sebelum Masehi, maka Payakumbuh akan dituju oleh banyak orang di dunia. Yang

pasti para arkeolog bukan hanya berkunjung, tapi akan tinggal sementara di Payakumbuh untuk meneliti itu.

"Bayangkan saja, Malin Kundang saja yang jelas cerita fiktif mampu menggaet wisatawan. Apalagi peradaban Maek yang jelas ada buktinya. Bukti yang terungkap baru menhir, alias pemakaman, pusat kotanya dimana, ya belum. Ini luar biasa," ujarnya.

Selain itu, tambah dia, banyak adat budaya bahkan kuliner Payakumbuh yang bisa membuat wisatawan tertarik. Tari Podang salah satunya. "Bisa jadi kita orang Payakumbuh menilai itu tak menarik. Padahal bagi orang lain itu sangat menarik. Harga dan angkatlah itu hingga ke luar negeri. Adakan festival-festival. Maka Payakumbuh akan jadi kota tujuan," paparnya.

Dengan mengangkat iven dan festival budaya, bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk datang ke Payakumbuh. Dengan kunjungan tersebut otomatis akan menggerakkan roda perekonomian kota.

"Selama menjadi Ketua DPRD saya sudah sering mengangkat festival budaya bertaraf internasional. Dan orang luar negeri kagum dengan budaya dan tradisi kita, karena tidak menemukannya di daerah lain, ini akan menjadi peluang untuk dilanjutkan," papar Supardi.

Supardi juga mengajak para

tokoh adat untuk "membangkitkan batang tarandam" dengan menggali lagi budaya, kesenian dan tradisi Payakumbuh yang hampir punah.

"Payakumbuh punya berbagai tradisi dan kesenian lama yang kini mungkin hampir punah. Ada Siropak, Basijobang, Tari Podang, Talemping Batu, dan berbagai kesenian asli Payakumbuh. Ini luar biasa, dan jika ditampilkan akan membuat Payakumbuh mendunia," tegas Supardi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Jefri Arifin berharap bimtek ini memberikan pemahaman kepada tokoh adat yang hadir terkait kemajuan kebudayaan.

"Kepada para niniak mamak, bundo kanduang, alim ulama, cadiak pandai dan parik paga nagari yang hadir, kami berharap kita bersama sama menjaga kebudayaan kita, karena kebudayaan adalah untuk menjaga kita bersama dari hal hal negatif," harap Jefri Arifin.

Bimtek angkatan 3 yang digelar pada 8 sampai 10 Juni 2024 di Bukittinggi, diikuti oleh 75 orang tokoh berbagai elemen di Kota Payakumbuh. Kegiatan yang merupakan pokir dari Supardi ini, digelar sebanyak empat angkatan. Dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang tantangan kebudayaan di era digital. (401)

Percepat Penurunan Stunting di Agam

LUBUK BASUNG - Ketua TP-PKK Kabupaten Agam Ny. Yenni Andri Warman bersama Dinas Dalduk KB PP dan PA sosialisasikan program BKKBN dalam rangka percepatan penurunan stunting di daerah setempat.

Ny. Yenni memaparkan materi dengan tema peran rumah tangga dalam penerapan DASHAT untuk cegah stunting di kantor Wali Nagari Sitalang, Senin (10/6).

DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) merupakan salah satu program yang dicanangkan BKKBN sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting. Dashat merupakan tugas seorang ibu yang mempunyai peran utama dalam memenuhi gizi anak untuk penyediaan makanan padat gizi bagi anaknya.

"Sebagai seorang ibu, anak adalah prioritas, apalagi mengenai tumbuh kembangnya sehingga anak terbebas dari gizi buruk dan stunting," katanya.

Program tersebut ditujukan kepada ibu yang sedang hamil dan melahirkan anak, dimana pada fase tersebut merupakan tahapan rawan bagi seorang ibu dalam memenuhi gizi seimbang kepada anaknya.

"Stunting memiliki dampak pada menurunnya kualitas SDM, produktivitas dan daya saing pada anak, salah satu penyebabnya adalah gizi yang tidak seimbang," katanya.

Terdapat 3 kegiatan yang dirancang dalam program DASHAT, yakni pemberdayaan masyarakat untuk penyedia makanan padat gizi dengan bahan lokal berupa pembagian makanan untuk kelompok sasaran ibu hamil, menyusui, anak balita dan calon pengantin. Kemudian, penguatan KIE serta pendampingan tentang makanan sehat yang mengandung gizi seimbang. (210)

Fahri Hamzah Usul Perppu Pilgub Diubah Lebih Sederhana

JAKARTA - Politisi Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menggantikan sistem Pilkada diubah lebih sederhana.

"Meskipun proses pilkada sedang berjalan, saya tetap mengusulkan agar presiden membuat Perppu tentang pemilihan gubernur (Pilgub), yang tidak perlu lagi memakai sistem pemilihan Pilkada. Tetapi presiden bisa menempuh cara lain yang lebih sederhana," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/6/2024).

Fahri mengaku punya alasan mengenai usulannya tersebut. Menurutnya, gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk memastikan manajemen pembangunan di daerah berjalan lancar.

"Menurut saya, penting seorang gubernur sejalan dengan presiden. Sebab jika tidak, maka pemerintah pusat akan kehilangan kaki tangan di daerah," ujar Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora itu seraya menyebut kalau pemilihan gubernur oleh rakyat banyak mudaratnya.

Dicontohkan, dengan memberikan kekuatan pilihan rakyat kepada gubernur, salah satu mudaratnya adalah karena kemudian gubernur dan bupati merasa sama-sama memiliki rakyat. Yang akhirnya kebijakan pembangunan gubernur itu beda dan bisa beda dengan bupati juga wali kota.

"Tetapi yang lebih parah adalah apabila dia berbeda dengan presiden, sehingga nyaris presiden itu tidak punya kaki tangan di bawah untuk memastikan pelaksanaan pembangunan, terutama kewenangan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi yang pemerintah daerah atau pemerintah pusat tidak lagi punya aparat di daerah," imbuhnya.

Namun demikian, Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini menegaskan kalau yang disampaikannya hanya sekadar saran. "Gubernur harusnya fokus menjadi kaki tangan pemerin tah pusat untuk melayani pemerintah daerah," pukasnya. (ery)

Wirid Bulanan BMKT Perkuat Kebersamaan

LUBUK BASUNG - Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Agam Ny. Yenni Andri Warman menghadiri wirid bulanan BKMT Kecamatan Lubuk Basung, di Masjid Sabilussaadah Balai Satu Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Minggu (9/6) lalu.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya mempererat kebersamaan dan memperkokoh nilai-nilai spiritual di tengah masyarakat, dan menjadi momentum penting untuk menyatukan hati dan pikiran dalam bingkai kebersamaan.

Wirid bulanan yang disambut antusias peserta dari kalangan ibu-ibu BKMT tersebut dihadiri tak kurang dari 500 orang yang berasal dari 42 masjid dan mushala se Kecamatan Lubuk Basung.

Ny. Yenni mengucapkan terima kasih kepada ketua BKMT Kecamatan Lubuk Basung atas digelarnya kegiatan ini yang diikuti ratusan orang tersebut.

Disebutkan, dalam waktu dekat Kecamatan Lubuk Basung menjadi tuan rumah Jambore BKMT ke-3 Kabupaten Agam. "Semoga BKMT Kecamatan Lubuk Basung bisa mempertahankan juara umum di tingkat Kabupaten Agam," ujarnya.

Terkait pentingnya kegiatan ini, Ny. Yenni Andri Warman menegaskan perlu memelihara hubungan yang baik antar komunitas dan saling menguatkan dalam aspek spiritual.

Disamping itu, katanya, wirid bulanan ini bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga sarana untuk memperkuat hubungan sosial dan spiritual di antara sesama. "Kita harus senantiasa menjaga persaudaraan dan solidaritas sebagai pondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis," katanya. (210)



BKMT—Ketua BKMT Agam Ny. Yenni Andri Warman saat wirid bulanan BKMT Kecamatan Lubuk Basung, di Masjid Sabilussaadah Balai Satu Manggopoh, Minggu (9/6). (ist)

HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA

PLN Kumpulkan 302 Ton Sampah

JAKARTA - PT PLN (Persero) berhasil mengumpulkan 302 ton sampah melalui aksi bersih lingkungan pada program Green Employee Involvement dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Jumlah sampah tersebut mampu mencegah emisi sebesar 150 ton CO2 karena sampah yang dikumpulkan diolah menjadi barang bernilai guna.

Program yang diinisiasi oleh PLN ini diikuti oleh lebih dari 16 ribu orang dengan membersihkan 3 waduk, 29 sungai, 34 pantai, dan 2 hutan kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Direktur Pencegahan Pencemaran Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tulus Laksono mengapresiasi langkah PLN ikut berkontribusi nyata kepada lingkungan melalui aksi bersih lingkungan dan olah sampah serentak. Tulus menilai pentingnya keterlibatan semua pihak dalam pelestarian lingkungan sebagai upaya penyelesaian krisis iklim yang menjadi tantangan saat ini.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada PLN. Ini merupakan aksi nyata bagi lingkungan. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup ini, penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan berkeadilan adalah tema yang ditetapkan oleh Menteri LHK. Karena memang ke depan krisis iklim ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap cuaca," ujar Tulus.

Penjabat Gubernur Gorontalo Mohammad Rudy Salahuddin yang mengikuti



GUNAKAN PERAHU—Pegawai PLN bersama komunitas dan para pemangku kepentingan kolaborasi menggunakan perahu melakukan pembersihan Waduk Saguling yang berada di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (3/6). Sampah yang terkumpul dibawa ke darat untuk dilakukan pemisahan dan pengolahan menjadi barang yang memiliki nilai guna. (ist)

aksi bersih pantai Blue Marlin menyampaikan apresiasi atas kegiatan peduli lingkungan yang digelar oleh PLN tersebut. Dirinya menilai, aksi ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan juga lingkungan ini.

"Terima kasih kepada PLN yang telah menggandeng seluruh stakeholder untuk menggelar aksi bersih pantai ini. Aksi ini menjadi momen penting untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran secara konsisten dalam memperbaiki lingkungan," terang Mohammad.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN secara nyata terus membuktikan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan. Pegawainya terjun langsung bersama masyarakat membersihkan lingkungan melalui program Green Employee Involvement. "Ratusan ton sampah

sudah terkumpul pada kegiatan yang bertepatan dengan momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kami, di PLN ingin memberikan langkah nyata terjun ke masyarakat dan berkolaborasi dalam transisi energi melalui penanganan sampah. Program ini juga wujud implementasi prinsip Environmental, Social and Governance (ESG)," ucap Darmawan.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menjelaskan, lebih dari 16 ribu peserta yang mengikuti kegiatan ini antara lain pegawai PLN, komunitas, stakeholders, dan kolaborator pengolah sampah.

"Sampah yang terkumpul lalu kami pilah. Dari situ sampah tersebut bakal diolah menjadi barang berdaya guna bekerja sama dengan kolaborator, sehingga ini benar-benar menjadi zero

waste," ujarnya.

Sampah organik dibuat menjadi furniture, kerajinan, paving block, ecobrick dan batako. Sedangkan, sampah organik diolah menjadi pupuk dan pakan ternak.

Kegiatan ini sejalan dengan nilai Creating Shared Value (CSV) yang dilakukan PLN dalam memberikan dampak nyata khususnya pada perekonomian dan lingkungan sosial masyarakat. Melalui kegiatan ini masyarakat tidak hanya dapat berparatisipasi menjaga lingkungan, tetapi juga dapat merasakan manfaat ekonomis.

"Olahan tersebut bakal lebih bermanfaat bagi ekonomi bagi masyarakat, dan tentu saja menambah nilai yang awalnya sampah kemudian kita olah menjadi nilai yang lebih produktif sehingga masyarakat di sekitar kita pun turut merasakan dampak ekonomi sirkular," tutupnya. (105)



SUPARDI
KETUA DPRD
SUMBAR

IRSYAD SAFAR
WAKIL KETUA
DPRD SUMBAR

SUWIRPEN SUIB
WAKIL KETUA
DPRD SUMBAR

INDRA DT RAJO LELO
WAKIL KETUA
DPRD SUMBAR

RAFELIS
SEKRETARIS
DPRD SUMBAR

DPRD Sumbar Tetapkan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Sebagai Usul Prakarsa

PADANG - SINGGALANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang penyelenggaraan penyiaran sebagai usul prakarsa DPRD.

Penetapan tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna, Senin (10/6) di gedung DPRD setempat.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar yang memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, salah satu fungsi strategis DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah fungsi pembentukan peraturan daerah (perda).

Fungsi pembentukan Perda tersebut dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk penyusunan, pembahasan dan penetapan ranperda bersama-sama dengan Kepala Daerah.

"Melalui fungsi pembentukan Perda tersebut, DPRD dapat mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat di daerah untuk dapat dimasukkan dalam perda," ujar Irsyad.

Ia memaparkan, dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dikemukakan bahwa ranperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau badan pembentukan perda (Bapemperda).

"Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak DPRD dimaksud, 21 Mei 2024 yang lalu, Anggota DPRD Sumbar yang tergabung dalam Komisi I Bidang Pemerintahan, mengajukan usul prakarsa terhadap penyelenggaraan penyiaran," ujarnya.

Ranperda tersebut juga telah termasuk dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Tahun 2024.

Ia mengatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 4



Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 dimaklumkan bahwa ranperda usul prakarsa yang disampaikan Anggota DPRD, akan diteruskan Pimpinan DPRD diteruskan kepada Bapemperda. Tujuannya untuk dilakukan kajian dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

Berkenaan dengan itu sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan dalam rapat musyawarah, Bapemperda telah melakukan kajian, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Ketua Bapemperda DPRD Sumbar, Budiman mengatakan Bapemperda telah melakukan kajian, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap ranperda tersebut.

"Untuk mendapatkan masukan, pertimbangan dan penyempurnaan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran, Bapemperda telah melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya rapat kerja dengan SKPD terkait dilingkup Pemerintah Provinsi Sumbar hearing dengan para pengusul dan konsultasi dengan Kementerian terkait," ujar Budiman.

Ia mengatakan, dari hasil



kajian yang dilakukan Bapemperda, terdapat perubahan dan penyempurnaan yang cukup substansial terutama terkait kewenangan daerah dan materi muatan yang disusun dalam draft ranperda.

Budiman mengatakan, Bapemperda ranperda yang disusun karena adanya aspirasi Masyarakat terkait penyiaran ini diharapkan dalam konten pemberitaan lebih mengutamakan adat isitiatid di Minangk-

abau. Selain itu, terkait ketentuan mengenai kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan sarana yang menyangkut pemberitaan dalam draft Ranperda yang diajukan merupakan kewenangan Pusat maka ketentuan tersebut tidak perlu diatur dalam draft Ranperda ini. "Sehingga Kami dari Bapemperda menyarankan agar muatan ranperda difokuskan pada materi penyiaran saja

yang disesuaikan dengan etika, budaya dan filosofi masyarakat Minangkabau," ujarnya.

Penyesuaian terhadap materi ini diharapkan dilakukan sepanjang proses pembahasan sehingga tidak menimbulkan masalah nanti dalam pelaksanaan fasilitasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I, Maigus Nasir mengatakan ranperda ini diajukan sebagai usul prakarsa karena tuntutan peraturan perundangan.

"Selain itu juga dikarenakan tuntutan aspirasi masyarakat untuk memajukan system penyelenggaraan penyiaran yang berbasis nilai nilai keunggulan kedaerahan Sumbar dalam rangka kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Maigus mengatakan keberadaan ranperda ini bertujuan untuk memperkuat integrasi daerah, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemudian juga dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri Penyiaran di Sumatera Barat.

Kemudian, mewujudkan penyelenggaraan Penyiaran

yang mendukung terwujudnya tujuan Pembangunan Kebudayaan Sumbar. Sebagai sarana pendidikan bagi warga dalam mengimplementasikan nilai falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

Mempromosikan keunggulan dan potensi sosial, budaya, pariwisata dengan mengoptimalkan sumber daya Daerah.

"Ranperda ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari program Siaran yang bertentangan dengan norma sosial dan kearifan lokal. Serta meningkatkan siaran konten lokal yang bermutu dan mengembangkan budaya Minangkabau," ujarnya.

Pada draf awal, ranperda ini terdiri dari 11 BAB dan 32 pasal. Beberapa diantaranya mengatur tentang kelembagaan penyiaran, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan, lembaga penyiaran komunitas, kepemilikan lembaga penyiaran daerah, program siaran lokal.

Kemudian bab tentang pengawasan program siaran lokal, peran serta masyarakat, sanksi administrasi, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.(*)

